**ABSTRAK**

Magang Riset Terapan Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Akhir ini berjudul **“Efektivitas Restribusi Parkir Terhadap Peningkatan PAD Kota Ambon Propinsi Maluku”** . Yang dibimbing oleh Pembimbing I. *Drs. Zulkarnaen Ilyas,MM*, dan Pembimbing II. *Drs. Agung Manghayu.M.Si.* Tujuan penelitian dan magang riset terapan pemerintahan ini adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pada setiap penelitian tahap pertamanya ialah menentukan atau memilih sesuatu pokok masalah yang akan diteliti untuk mengetahui efektivitas Pendapatan penerimaan dari sektor parkir kendaraan bermotor cukup berpotensi atau tidak dalam memberi kontribusi PAD Kota Ambon. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir, dan upaya dinas perhubungan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oleh Halim (2009: 72), Evektifitas adalah pertanggungjawaban dan tujuan secara tepat supaya hasilnya berguna dari suatu organisisi dalam hal ini pemerintah daerah kota Ambon Maluku,

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai evektifitas restribusi parkir di Kota Ambon. Data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan magang riset terapan pemerintahan yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kota Ambon bahwa penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Ambon dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah penerimaan setiap tahunnya tapi masih mengalami penurunan presentase yang disebabkan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Sehingga mendorong Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk terus berinovasi dan melakukan peningkatan terhadap pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan penerimaan hasil retribusi.

Kata kunci : Retribusi Perparkiran kenderaan, dan PAD.

**ABSTRACT**

Apprentice of applied research government in the preparation of this Final Report titled "The Effectiveness of Parking Retribution of Parking in increasing PAD of Ambon City of Moluccas Province". Guided by Supervisor I. Drs. Zulkarnaen Ilyas, MM, and Advisor II. Drs. Agung Manghayu.M.Si. The purpose of research and Apprentice of applied research governmentis to solve or find answers to the problems. Therefore, in each research the first step is to determine or choose something the subject matter to be studied to know the effectiveness of income from the motor vehicle parking sector has enough potential or not to contribute to the PAD of Ambon City. To know what barriers faced by the transportation agency in increasing parking charges, and the effort of the transportation office to overcome these barriers.

The method used in this research is qualitative with using qualitative approach and the theory used in this research is the theory by Halim (2009: 72), Evectivity is the responsibility and objectives appropriately so that the results are useful from an organization in this case the local government of Ambon City of Moluccas province.

Based on the results of research analysis about the Effectiveness of parking retribution in Ambon City. Data obtained from the results of implementation of Apprentice of applied research government that author undertook in Office of Transportation of Ambon City that the income of Parking retribution on the Edge of Public Road of Ambon City from in 2014 to 2017 has increased the amount of income each year but still decreased percentage due to several problems that occurs in the field. It will also give effect to the amount of income of Original Regional Income (PAD) of Ambon City. That gives influence to the amount of income o Original Regional Income (PAD) of Ambon City. So that encourages Transportation office of Ambon city to undertake a innovation and to increase the management of parking retribution in on public roads for increasing income of the retribution.

Keywords: Retribution of parking of vehicles and Original Regional Income (PAD).

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ambon saat ini ditekankan pada otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan dalam bentuk kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang; “Pemerintahan Daerah mengatur tentang sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah.”

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan bidang dalam seluruh bidang pemerintahan.

Pemerintahan daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalani roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan daerahnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang; “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” pasal 1 poin 13 juga menjelaskan bahwa “pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Kewenangan pengelolaan keuangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini diambil oleh pemerintahan dengan mempertimbangkan perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun di Kota Ambon, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah.

Selain itu retribusi pembayaran parkir juga memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah bagi pembangunan daerah, juga memberi kesempatan tenaga kerja baru bagi tukang parkir itu sendiri yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Dengan adanya pengelolaan parkir, maka Pemerintahan Kota Ambon menyediakan layanan jasa umum bagi masyarakat yang menggunakan tepi jalan umum sebagai areal berhentinya kendaraan untuk sesaat dengan ditinggalkan pengemudinya dan bukan pemberhentian selamanya tanpa ada batas waktu tertentu. Layanan jasa umum ini diatur dalam aturan yang mengikat yang dibuat oleh pemerintahan Kota Ambon.

Dalam peraturan walikota nomor 17 Tahun 2013 Tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Jalan Umum pasal 2 bahwa pengaturan parkir kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan jalan yang tertib, teratur, aman dan nyaman bagi setiap pengguna jalan dalam kota, dengan demikian maka dipandang perlu untuk mengatur pengelola parkir tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pasal 1 peraturan nomor 17 tahun 2013 menyatakan; “bahwa parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.

Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada bab V pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa;

1. Retribusi parkir dipungut dalam wilayah kota tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan.
2. Tempat fasilitas pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum bab IV pasal 5 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa:

1. Untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas kendaraan bermotor pada kawasan tepi jalan umum pada ruas jalan tertentu di pusat kota ditetapkan sebagai kawasan khusus parkir.
2. Kawasan khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
3. Ruas Jalan A.Y Patty
4. Ruas Jalan Sam Ratulangi
5. Ruas Jalan A.M Sangadji
6. Ruas Jalan Diponegoro
7. Ruas Jalan Said Perintah
8. Ruas Jalan Sultan Baabullah
9. Ruas Jalan Yos Sudarso
10. Ruas Jalan Ahmad Yani
11. Ruas Jalan Tulukabessy
12. Ruas Jalan Setia Budi
13. Ruas Jalan Anthoni Rheebok
14. Ruas Jalan Sultan Hairun
15. Ruas Jalan Philip Latumahina
16. Ruas Jalan Yaan Paays
17. Ruas Jalan Imam Bonjol
18. Ruas Jalan Pattimura
19. Ruas Jalan Batu Merah dan sekitarnya

Walikota Ambon telah menetapkan ruas jalan kawasan parkir khusus untuk kendaraan bermotor, wilayah perparkiran di kota Ambon terdapat 17 tempat parkir di tepi jalan umum, namum yang terealisasi ada 12 (dua belas) yaitu:

1. Ruas Jalan A.Y Patty
2. Ruas Jalan Sam Ratulangi
3. Ruas Jalan Diponegoro
4. Ruas Jalan Said Perintah
5. Ruas Jalan Yos Sudarso
6. Ruas Jalan Ahmad Yani
7. Ruas Jalan Setia Budi
8. Ruas Jalan Anthoni Rheebok
9. Ruas Jalan Sultan Hairun
10. Ruas Jalan Imam Bonjol
11. Ruas Jalan Pattimura
12. Ruas Jalan Batu Merah

Ruas jalan kawasan parkir khusus di tepi jalan umum yang terealisasi ada 12 di karenakan pengguna jasa parkir masih minim dan belum ada pengelolanya.

Titik perparkiran yang kena distribusi dengan jumlah yang banyak, demi kelancaran, dalam proses pengelolaan, maka diberikan kepada pihak kedua. Dinas perhubungan Kota Ambon bertindak selaku pemerintahan Kota Ambon pada pihak pertama sebagai penanggung jawab bersama pengelola parkir adalah merupakan suatu kesepakatan kerja antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon sebagai perancang, Dinas Perhubungan sebagai Penyelenggara yang adalah pihak pertama dan orang pribadi atau badan sebagai pihak kedua yang mengelola parkir di tepi jalan umum.

Adapun isi kontrak parkir di tepi jalan dalam wilayah kota Ambon pada pasal ketentuan umum mengatakan bahwa :

1. Untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dalam wilayah Kota Ambon, maka pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak.
2. Semua pengelola dapat menjalankan aktifitas penagihan parkir disetiap ruas jalan dalam wilayah Kota Ambon sesuai dengan peruntukannya, kecuali parkiran kendaraan toko, kendaraan perusahaan, kendaraan restauran, kendaraan warung kopi, kendaraan hotel dan mobil angkutan sewa.

Hal pengecualian yang tidak kena distribusi parkir diatur dalam aturan tersendiri. Untuk tertibnya petugas parkir maka mekanisme pengaturan diatur pula dalam isi kontrak lain yaitu :

1. Parkir dikelola oleh juru parkir (jukir) dengan mengantongi identitas, memakai seragam atau rompi yang berlaku disetiap ruas jalan dalam wilayah Kota Ambon sesuai kontrak yang telah ditandatangani.
2. Penagihan dilakukan oleh juru parkir disetiap ruas jalan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Bagi semua masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan baik roda 2 (dua), roda 4 (empat), roda 6 (enam), atau lebih.
3. Penagihan dilakukan oleh juru parkir yang telah ditunjuk oleh pengelola masing-masing sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
4. Pelaksanaan parkir ditepi jalan umum selama 317 hari kalender dan terhitung dari masa efektif 1 Januari sampai dengan Desember.

Disamping itu mekanisme penagihan dari masyarakat pengguna parkir ditepi jalan, dan penyetoran hasil tagihan parkir ke pemerintah Kota Ambon mekanisme pembayaran dan penyetoran juga diatur dalam isi kontrak yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan oleh pengelola parkir kepada bendahara penerima di dinas perhubungan Kota Ambon disetiap jam kerja.
2. Pembayaran oleh pengelola parkir dilakukan disetiap minggunya sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati.
3. Nilai kontrak untuk Parkir ditepi jalan umum untuk ruas jalan A.Y. Patty dan sekitarnya adalah sebesar Rp. 98.904.000,- Terbilang (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) Untuk masa efektif 317 hari terdiri dari, Roda 2 (dua) 80 unit x 1000 x 317 = Rp. 25.360.000,- Terbilang (Dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kendaraan roda 4 (empat) 120 x 2000 x 317 hari = Rp. 73.544.000.- terbilang (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
4. Pihak kedua wajib menyetor setiap minggunnya ke bendahara dinas perhubungan Kota Ambon sebesar Rp. 2.060.500,- terbilang (dua juta enam puluh ribu lima ratus rupiah).
5. Tidak dibenarkan bagi pengelola untuk menitipkan sejumlah uang retribusi parkir kepada pegawai dinas perhubungan Kota Ambon atau pihak lain, dan disetor ditempat lain atau diluar ruangan bendahara dan yang buka bendahara.

Nilai kontrak untuk parkir ditepi jalan umum untuk ruas jalan dititik yang lainnya masing-masing berbeda karena tergantung dari jumlah kendaraan yang sering menggunakan badan jalan untuk parkir.

Kebijakan Pemerintahan Kota Ambon untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan dari sektor diharapkan demikian, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yaitu mengenai kawasan parkir khusus di jalan A.Y Patty hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat yang diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 Bab IV pasal 5 ayat 4 menyebutkan; “kendaraan roda 3 (tiga) juga seperti becak dilarang melintas pada ruas jalan A.Y Patty mulai pukul 06.00-18.00 WIT”. Dan kendaraan roda 2 (dua) dilarang untuk memarkir kendaraan pada ruas jalan tersebut. Masih terdapat tunggakan pihak kedua kepada pemerintah kota hal ini dapat kita lihat pada tabel laporan.

**Tabel 1.1**

**Daftar Tunggakan Parkir Kontrak**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pengelola** | **Lokasi Parkir** | **Jumlah Tunggakan**  **(Per Minggu)** | **Setoran Per Minggu**  **(Rp)** | **Denda**  **(2%)** | **Total yg Harus dibayar** |
| 1 | Hendrik | Jl. Said Perintah & P. Latumahina | 14 | 957.000 | 267.960 | 13.665.960 |
| 2. | Hendrik | Jl. Imam Bonjol & A. Gidion | 12 | 330.200 | 79.248 | 4.041.648 |
| 3 | Latuheru | Jl. Pattimura, A.Jani & Setia Budi | 8 | 315.000 | 50.400 | 2.570.400 |
| 4 | Muh. Abubakar | Pasar Batu Merah | 3 | 1.230.000 | 73.800 | 3.763.800 |
| 5. | M. Marasabessy | Jl. Dipenogora | 3 | 2.443.600 | 146.616 | 7.477.416 |
| 6 | Bahaweres | Jl. Sam Ratulangi | 5 | 1.850.000 | 185.000 | 9.435.000 |
| 7 | Amir Marasabessy | Jl. Yos Sudarso. P. Losari | 5 | 463.300 | 46.330 | 2.362.830 |
| 8 | Kanikir | ST. Hairun, Di Panjaitan | 3 | 423.300 | 25.398 | 1.295.298 |
| 9 | Soamole | Pasar Mardika | 2 | 5.085.200 | 203.408 | 10.373.808 |
| 10 | Tuanany | Jl. Anthony Rhebook | 8 | 363.200 | 58.112 | 5.142.912 |
| 11 | Tuasamu | Jl. A.J. Patty., | 28 | 2.060.500 | 1.153.880 | 58.847.880 |
|  | **J u m l a h** |  | **91** | **15.521.300,-** | **2.290.152** | **118.967.962.** |

**“Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon”.**

Ket : Total yang harus dibayar = (Jumlah Tunggakan perminggu x Setoran perminggu) + 2 %.

Namun yang terjadi berdasarkan observasi awal penulis terhadap jasa tukang parkir akan mempengaruhi omset pendapatannya, belum lagi penggunaan lahan parkir oleh pemilik toko di sepanjang jalan A.J. Patty dengan memarkirkan mobil/kenderaannya berjam-jam bahkan kadang-kadang digunakan sebagai garasi.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka penulis merasa perlu unutk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.**

* 1. **Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi**
     1. **Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Harapan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon dari penerimaan sektor parkir. Pendapatan penerimaan daerah dari sektor parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberi kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah.
2. Belum semuanya setoran parkir yang dikelola oleh pihak kedua (orang/pribadi) disetor kepada pemerintah Kota Ambon sesuai dengan nilai isi perjanjian kontrak.
3. Rendahnya kemampuan aparatur pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk bertindak terhadap setiap kendaraan yang parkir di tepi jalan.
   * 1. **Fokus**

Untuk memfokuskan magang riset terapan pemerintahan, maka penulis dapat merumuskan masalah yang merupakan objek penelitian yaitu :

* + - 1. Bagaimana efektivitas retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ?
      2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir ?
      3. Upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir ?
    1. **Lokasi**

Objek dari magang riset terapan pemerintahan ini adalah Kantor Dinas Perhubungan Kota Ambon jalan Putuhena Nomor 1 di Lingkungan Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sedangkan yang menjadikan subyek penelitian ini adalah distribusi parkir di tepi jalan yang ada di Kota Ambon.

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Dalam sub bab ini akan dipaparkan maksud dan tujuan penulis melakukan magang di Kantor Dinas Perhubungan Kota Ambon**.**

* + 1. **Maksud**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan melihat fakta apakah penerimaan dari distribusi parkir kenderaan bermotor dapat menunjang pendapatan keuangan daerah Kota Ambon atau tidak.

* + 1. **Tujuan**

Sesuai dengan judul dan masalah penelitian yang dirumuskan maka tujuan dari magang riset terapan pemerintahan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas Pendapatan penerimaan dari sektor parkir kenderaan bermotor cukup berpotensi atau tidak dalam memberi kontribusi bagi penunjang pemasukan keuangan daerah. (PAD) Kota Ambon
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir.
   1. **Kegunaan**

Kegunaan untuk Praja :

Sebagai wahana untuk mempraktek ilmu yang didapat setelah menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman sebagai bekal untuk melaksanakan tugas dilapangan nanti.

Kegunaan untuk dinas pendapatan daerah :

Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah Provinsi Maluku khusunya Pemerintah Kota Ambon dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui distribusi.

Kegunaan untuk lembaga pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri :

Sebagai referensi bagi lembaga pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri khususnya Fakultas Manajemen Pemerintahan Program Studi Keuangan Daerah.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS DAN LEGALISTIK**

**2.1 Tinjauan Teoritis**

**2.1.1 Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Halim, dkk (2009:72) menyatakan bahwa;

“Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuantitas maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain.”

Bayangkara (2008:14) “efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahan untuk mencapai tujuannya”. Dari pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

13

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tídak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivítas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

**2.1.2 Retribusi**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Banyak pandangan umum yang mengartikan bahwa retribusi sama dengan pajak, akan tetapi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak sifatnya memaksa dan wajib**,** sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung sesuai undang-undang. Disamping itu menurut Mardiasmo (2006:12);

“mengatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelengarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sedangkan retribusi sifatnya tidak wajib”.

Perbedaan kedua aturan ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**

**Perbedaan antara Pajak dan Retribusi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **Faktor yang Membedakan** | **Pajak** | **Retribusi** |
| 1 | Keputusan | Keputusan atau undang-undang dari pemerintah pusat | Keputusan dari pemerintah daerah |
| 2 | Ketetapan | Pajak diatur dengan Undang-undang. | Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. |
| 3 | Pihak Pemungut. | Pemerintah pusat | Pemerintah daerah |
| 4 | Sifat Pemungut | Wajib yang dapat dipaksa | Tidak wajib |
| 5 | Imbalan/jasa | Tidak mendapat imbalan/jasa secara langsung | Mendapat imbalan secara langsung |
| 6 | Perlakuan aturan | Aturan pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia | Aturan retribusi berlaku untuk daerah yang bersangkutan |
| 7 | Sumber Pendapatan | Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat | Retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. |

“Sumber : blogspot.com”

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah”. Dari pengertian tersebut berarti secara otonom pemerintah daerah khususnya Kota Ambon mempunyai hak untuk mencari serta mengelola berbagai sumber-sumber yang ada di wilayahnya guna meningkat pendapatan atau keuangan daerah.

* + - 1. **Retribusi Daerah.**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 64, mengatakan bahwa “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dalam pokok-pokok pengaturan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan adalah :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam menyediakan layanan dan penyelengaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah.

Disamping itu dalam pokok-pokok pengaturan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) jenis retribusi daerah yaitu 1). retribusi tera/tera ulang, yang, 2). retribusi pengendalian menara telkomunikasi, 3). retribusi pelayanan pendidikan, 4). retribusi izin usaha. keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu 1*). Retribusi Jasa Umum*, 2). *Retribusi Jasa Usaha,* dan 3). *Retribusi Perizinan Tertentu*.

Marihot P. Siagian (2005:6), mengatakan bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi”, hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Ambon diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Tujuan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun pemungutan tersebut adalah :

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Jika kalau di lihat dari sifat retribusi daerah maka dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu :

1. Retribusi yang sifatnya umum, artinya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya mereka yang ingin parkir motor di badan jalan protokol, walaupun hanya beberapa waktu tetap dikenakan pungutan retribusi
2. Retribusi yang pungutannya bertujuan, artinya bahwa retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, misalnya kewajiban restribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan izin trayek angkot.

**2.1.3 Parkir**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Adapun definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Poerwadarmita (1976),* parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. *Pignataro (1973) dan Sukanto (1985)* menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan.
3. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.
4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

* 1. **Legalistik**

**2.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasca terjadinya *social and political turbulance* pada tahun 1998 yang ditandai dengan berakhirnya rezim orde baru, terjadinya perubahan yang cukup dinamis dan signifikan. Diantaranya adalah perubahan paradigma pengelolaan kekuasaan pemerintahan, yang ada pada awalnya lokus kewenangannya dominan berada pada pemerintah pusat (sentralistik) kini kewenangan tersebut mengalir kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (desentralistik) yang kemudian kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu dalam pasal 1 angka 12 dalam Undang-undang ini juga dielaskan bahwa “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada pelaksaannya, otonomi daerah di Indonesia membawa pengaruh positif. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Dengan diterapkannya otonomi daerah diberikan wewenang untuk mencari sendiri sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber potensi yang terdapat didaerah dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan sendiri sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah meliputi
2. Pajak daerah
3. Retibusi daerah
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
6. Pendapatan transfer; dan
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, di mana penerimaan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

* + 1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**

Salah satu sumber potensi daerah yang memegang peranan penting dalam menyumbang pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah, di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 64 menyebutkan bahwa “retribusi adalah daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Oleh sebab itu retribusi merupakan suatu kewajiban yang harus kita bayarkan secara langsung atas pelayanan jasa atau pemberian tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah yang mana pelayanan tersebut dapat kita rasakan secara langsung. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 108 ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Objek retribusi adalah:
2. Jasa Umum
3. Jasa Usaha dan
4. Perizinan tertentu

Perbedaan dari ketiga jenis objek retribusi tersebut adalah objek retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaat umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan, objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersil yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan ruang pengguna sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 menjelaskan:

Jenis retribusi jasa umum adalah:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pangabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus
11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 127 menjelaskan mengenai jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut :

Jenis retribusi jasa usaha adalah :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Mengenai jenis retribusi perizinan tertentu di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 141 ialah sebagai berikut :

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek dan
5. Retribusi izin usaha perikanan

Mengenai objek retribusi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 115 dengan isi “objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf e adalah “penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dimana penggunaan jasa pelayanan tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan peraturan daerah masing-masing

* + 1. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 8 disebutkan bahwa “prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan”. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 12 juga menjelaskan bahwa “tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 diatas yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah, hal ini disebabkan tidak semua daerah di Indonesia memiliki kondisi yang sama karena apabila pelaksanaan pemungutan ditetapkan berdasarkan undang-undang maka kemungkinan yang terjadi adalah suatu daerah tidak bisa secara efektiv mengatur sumber pendapatan retribusi dari daerah tersebut. Maka dari itu setiap kepala daerah wajib membuat sendiri peraturan daerahnya untuk menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerahnya demi membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dan memajukan pembangunan daerahnya.

* + 1. **Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Di Kota Ambon saat ini mengenai retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum serta landasan dalam pemungutan retribusi di Kota Ambon. Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa “retribusi parkir dipungut dalam wilayah kota tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa “subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan tepi jalan umum untuk parkir kendaraan”. Mengenai ketentuan besaran tarif retribusi pakir di tepi jalan umum di Kota Ambon juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 pasal 7 ayat (4), (5) dan (6) menjelaskan bahwa :

1. Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona bebas ditetapkan sebagai berikut :
2. Kendaraan bermotor roda dua Rp.1.000,-
3. Kendaraan bermotor roda tiga Rp.1.500,-
4. Kendaraan bermotor roda empat Rp.2.000,-
5. Kendaraan bermotor roda enam Rp.6.000,-
6. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.7.500,-

(5) Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona strategis ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor roda dua Rp 2.000,-
2. Kendaraan bermotor roda tiga Rp.2.500,-
3. Kendaraan bermotor roda empat Rp.3.000,-
4. Kendaraan bermotor roda enam Rp.7.500,-
5. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.10.000,-

(6) Besarnya tarif parkir untuk sehari parkir bagi becak dan gerobak ditetapkan sebesar Rp.1.000.-

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa saat ini Kota Ambon telah mempunyai ketetapan ketentuan tarif retribusi untuk dijadikan landasan hukum yang harus ditaati petugas pemungut retribusi maupun pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam menarik pungutan maupun pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

* + 1. **Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum**

Demi mewujudkan efektivnya penerimaan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Ambon maka Pemerintah Kota Ambon menetapkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013.

**BAB III**

**METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

**3.1 Desain**

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan suatu rangkaian langkah-langkah yang terencana dan sistimatis yang menghasilkan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Agar hasil penelitian dapat relevan digunakan maka langkah-langkah penelitian harus sesuai, serasi dan saling mendukung satu sama lain yang akan mempengaruhi bobot dan kualitas dari penelitian itu yang berupa kesimpulan yang tidak meragukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Suryabarata (2002:11) penelitian adalah “suatu proses untuk menetapkan suatu melalui tahap penyelidikan yang amat cerdik dengan hati-hati dan krisis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip” disamping itu menurut David Penny Adi (2010:2) bahwa “penelitian berarti berpikir secara sistimatis mengenai jenis-jenis persoalan yang untuk pemecahannya diperlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”

Berdasarkan dari pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa “penelitian merupakan suatu proses untuk memecahkan masalah atau memperoleh jawaban-jawaban terhadap jenis-jenis persoalan tertentu terkait fakta-fakta dan prinsip-prinsip.

29

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pada setiap penelitian tahap pertamanya ialah menentukan atau memilih sesuatu pokok masalah yang akan diteliti. Pokok masalah tersebut biasanya tercermin dalam judul atau topik suatu penelitian.

Metode penelitian merupakan pedoman tentang penelitian tentang bagaimana langkah-langkah suatu penelitian dilakukan. Menurut Nazir (2013:46) bahwa “Metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan proses ilmiah ini dilakukan diawali pada ketertarikan untuk mengetahui fenomena atau kejadian tertentu yang merupakan dasar dari penelitian, selanjutnya berhubungan dan berkembang menjadi gagasan, konseptual yang pada akhirnya menentukan metodologi penelitian yang sesuai”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskripstif dengan pendekatan induktif.

Menurut Sugiono (2011:11), bahwa penelitian deskripstif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain”. Pengamat menggunakan metode deskripstif dikarenakan waktu pengamatan yang sangat singkat sehingga memudahkan pengamat dalam proses pengambilan data kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif. Istilah metode pendekatan merujuk pada pedoman penulisan akhir yang diawali dengan observasi nyata dan spesifik dan diarahkan untuk mengidentifikasikan beberapa prinsip umum yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji dan diamati. Mardalis (2009:21) menyatakan bahwa “cara berpikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum”. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

Berdasarkan keterangan di atas metode deskripstif dengan pendekatan induktif yang nanti akan dipergunakan dalam usulan magang riset terapan pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dan membuat generalisasi dari data-data tersebut.

**3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Ridwan dalam Ikbar (2012:155) data “ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantatif yang menunjukan fakta”.

Tidak hanya itu, Sugiono (2016:225) “ada 4 macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan”.

Dalam penelitian kualitatif metode (teknik atau cara) pengumpulan data menunjukan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam bentuk benda, tetapi dapat dilihatkan penggunanya melalui angket (*questionere*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observastion*), ujian (*test*) dan dokumentasi. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan melalui wawancara (*interview*), pengamatan (*observastion*), serta dokumentasi.

1. Pengamatan/*Observation*

Untuk mengetahui banyak tentang informasi, peneliti melakukan pengamatan (*observation*). Pengamatan atau observasi merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan data yang bisa dilakukan oleh peneliti. Bungin dalam Satori dan Komariah (2014:105) menyatakan “bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan”. Selain itu menurut Syaodih dalam Satori dan Komariah (2014:105) juga mendefinisikan bahwa “observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”.

Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah pengamatan langsung pada natural *setting* bukan *setting* yang sudah direkayasa. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini didapat dari tempat dimana penelitian dilakukan. Data ini berupa data yang diperoleh dari studi pustaka, dan beberapa sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perhubungan Kota Ambon, dan Dinas Pendapatan Kota Ambon.

Wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab secara langsung kepada:

1. Dinas pendapatan Daerah Kota Ambon,
2. Dinas perhubungan Kota Ambon,
3. Pengelola parkir perorangan/pribadi (pihak kedua) sesuai perjanjian kerja
4. Masyarakat Penguna jasa parkir kendaraan bermotor.

Menurut Ulber Silalahi (2012:312) menyatakan bahwa “wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interview*) untuk mendapat sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”. Juga menurut Mardalis (2009:64) mengatakan bahwa “wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan-percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti”. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif *naturalistic* adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

Menurut Arikunto (2010:274) menyatakan bahwa “Metode dokumentasi yaitu mencari data melalui hal-hal data variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”. Mardalis (2009:74) juga mengatakan bahwa “mengumpulkan data disamping menggunakan instrument dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan”. Cara tersebut mempermudah peneliti, karena yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati.

Pengumpulan data melalui dokumen ini didasari pada dokumen-dokumen dan catatan-catatan resmi yang terdapat pada dinas perhubungan Kota Ambon.

**3.3 Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data merupakan data yang mentah. Data tersebut harus dianalisis untuk memberi arti atau makna pada data tersebut guna memecahkan masalah penelitian. Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) menjelaskan bahwa :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Adapun tahap analisis data yang digunakan penulis pada pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokus pada hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

1. Panyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Data yang telah terkumpul selanjutnya di olah dan disusun secara sistematis. Dalam penelitian kualitaitif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat naratif.

1. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

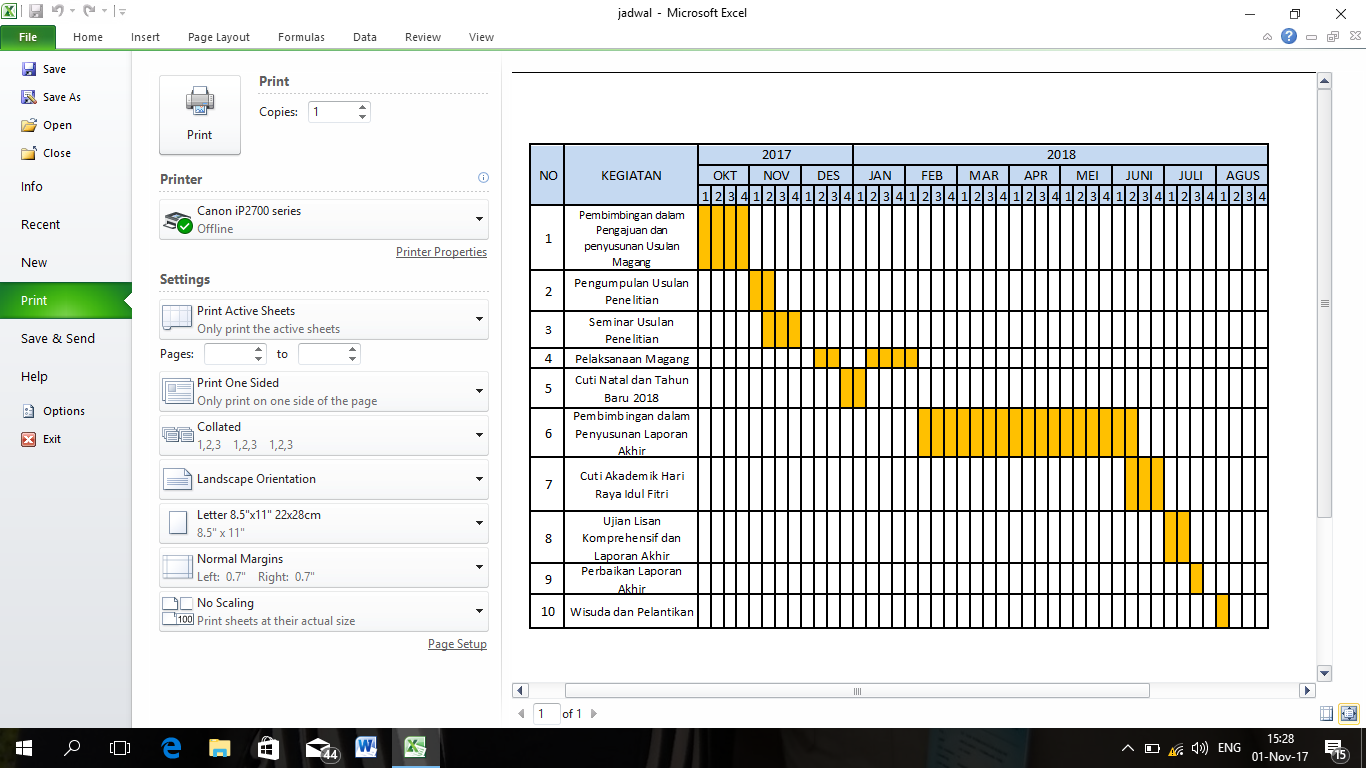
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran atau suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

* 1. **Jadwal**

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan magang riset terapan pemerintahan serta penulisan laporan akhir dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Akademik 2017/2018**



KETERANGAN : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Sumber : Lampiran IV Keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5-450 tahun 2017 Tentang

Kalender Akademik 2017-2018 Satuan Praja Utama Angkatan XXV

**BAB IV**

**ANALISIS FOKUS MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Magang**
2. **Keadaan Geografis**

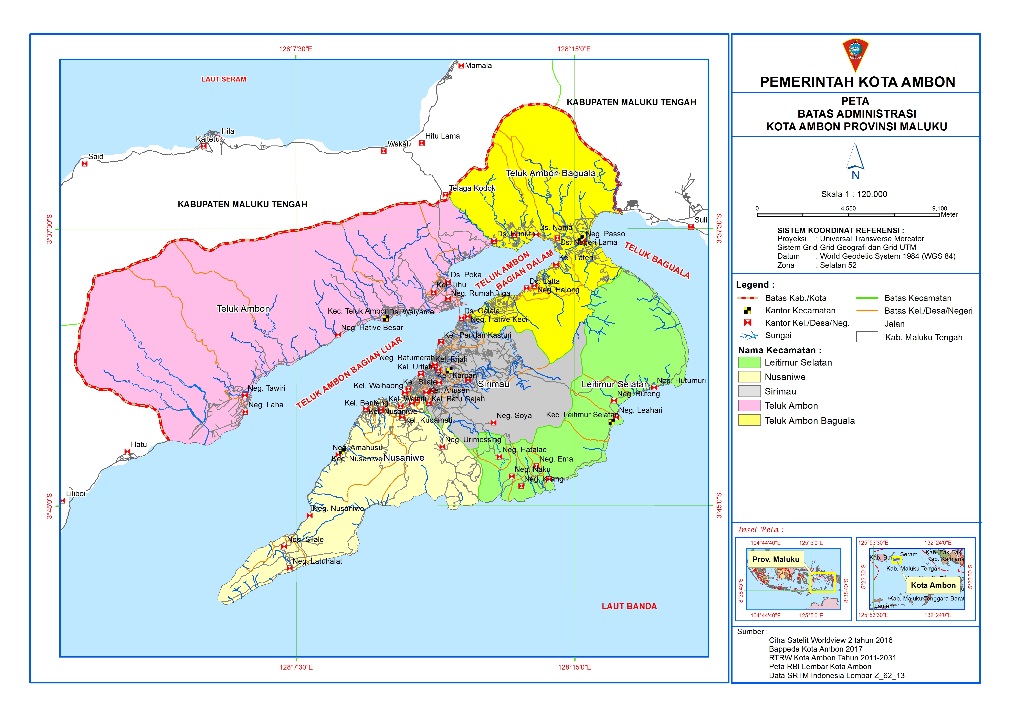
Lokasi Magang dilaksanakan di Kota Ambon, untuk itu penulis akan memberikan paparan mengenai gambaran umum Kota Ambon dilihat dari aspek geografis, topografi dan demografi. Kota Ambon merupakan salah satu kota yang menjadi sentral pemerintahan, perekonomian dan perdagangan di Provinsi Maluku. Secara geografis, letak Kota Ambon berada sebagian besar di wilayah Pulau Ambon dan secara astronomis terletak pada posisi 3°- 4° Lintang Selatan dan 128°-129° Bujur Timur. Letak geografis secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah. Adapun letak dan batas wilayah Kota Ambon sebagai berikut :

* Sebelah Utara berbatasan dengan Petuanan Desa Hitu, Hila, Kaitetu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
* Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

39

* Sebelah Barat berbatasan dengan Petuanan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

**Gambar 4.1**

**Wilayah Administrasi Kota Ambon**

Sumber : Bappeda Litbang Kota Ambon, 2016

Luas wilayah Kota Ambon seluruhnya 37 Km² sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, dan berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah tahun 1980 luas daratan Kota Ambon tercatat 359,45 Km². dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006, Kota Ambon terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 30 desa/negeri dan 20 kelurahan. Adapun kecamatan tersebut adalah Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan.

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Kota Ambon**

**Menurut Kecamatan serta Jumlah Desa/Kelurahan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kecamatan** | **Ibukota** | **Luas Wilayah**  **(Km2)** | **Jumlah Desa** | **Jumlah Kelurahan** |
| 1. | Nusaniwe | Amahusu | 88,35 | 5 | 8 |
| 2. | Sirimau | Karang Panjang | 86,82 | 4 | 10 |
| 3. | Teluk Ambon | Wayame | 93,67 | 7 | 1 |
| 4. | T.A. Baguala | Passo | 40,11 | 6 | 1 |
| 5. | Leitimur Selatan | Leahari | 50,50 | 8 | - |
| **Kota Ambon** | | | **359,45** | **30** | **20** |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Ambon Dalam Angka 2017

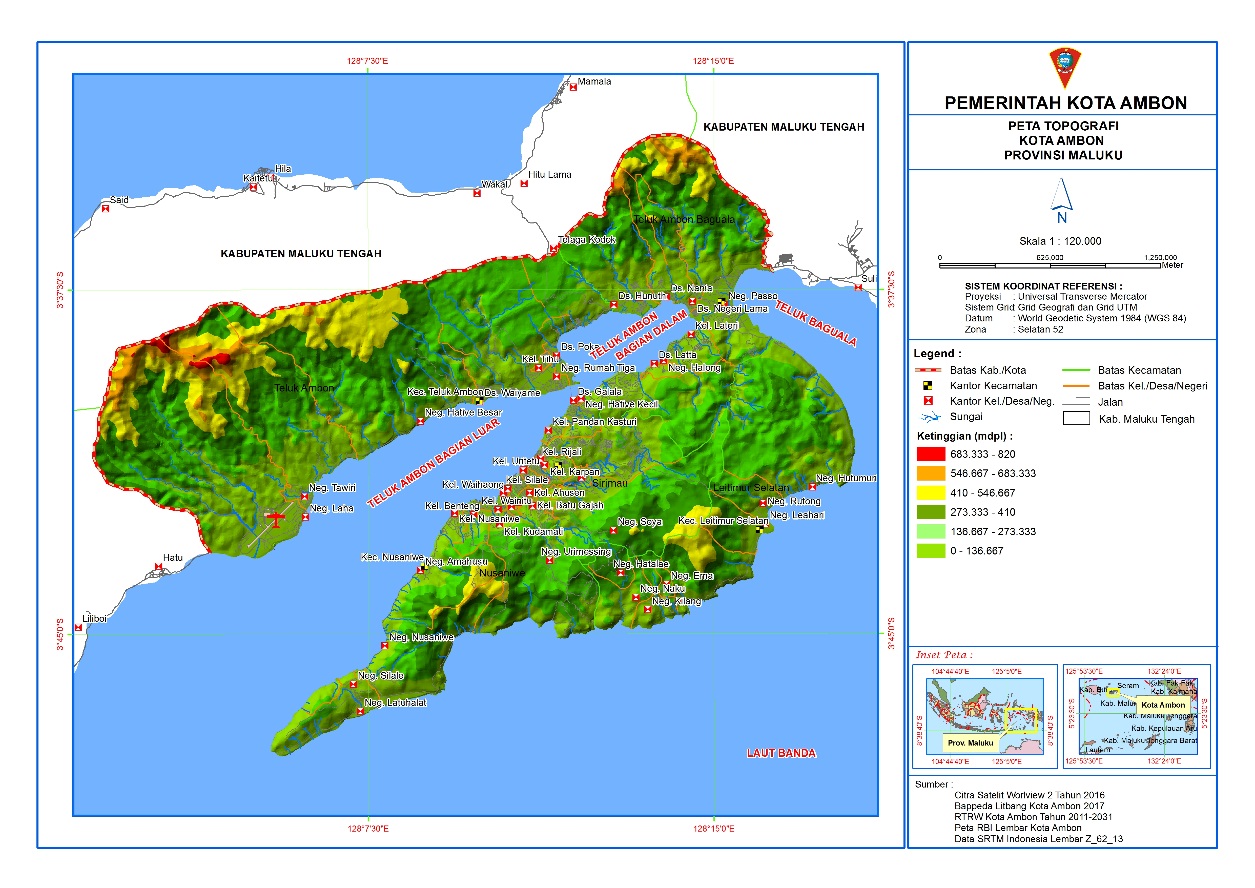
Kota Ambon terletak di Pulau Ambon, Pulau Ambon adalah bagian dari kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng.

Kondisi topografi wilayah Kota Ambon, meliputi daratan berbukit sampai berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20%, sebesar 73% wilayah, sedangkan wilayah daratan lainnya yang cenderung datar dengan kemiringan kurang dari 20% sebesar 17% wilayah, serta sisa sekitar 10% adalah pantai, pesisir dan teluk.

Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.
2. Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kearah daratan).
3. Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan.
4. Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30% terdapat pada kawasan pegunungan.

**Gambar 4.2**

**Peta Topografi Kota Ambon**

Sumber : Bappeda Litbang Kota Ambon, 2016

1. **Keadaan Demografis**

Seperti diketahui sebelumnya luas wilayah daratan Kota Ambon secara keseluruhan adalah 359,45 Km2 memiliki jumlah penduduk sebesar 427.934 jiwa pada tahun 2016. Dengan demikian rata-rata kepadatan penduduk di Kota Ambon adalah 2.057 jiwa/Km2. Dari data kependudukan diatas, Kota Ambon digolongkan pada kelas kota sedang. Karena berdasarkan kriteria BPS menegenai kelas kota, kota sedang adalah kota yang memiliki jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Kota Ambon juga merupakan kota dengan angka laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dimana di tahun 2016 mencapai angka 11,30% dengan angka rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 – 2016 sebesar 8,22%. Hal ini menunjukan kapasitas Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di timur Indonesia yang didukung dengan sektor utama kota sebagai pusat jasa dan perdagangan tentunya berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang cenderung didominasi faktor urbanisasi penduduk.

Jika dibagi berdasarkan wilayah administrasi kecamatan maka di tahun 2016 konsentrasi kepadatan penduduk tertinggi masih berada di kecamatan sirimau dengan jumlah penduduk 178.611 jiwa atau 41% dari jumlah penduduk kota ambon dan memiliki kepadatan penduduk 2.057 jiwa/Km2 yang merupakan kepadatan penduduk tertinggi diantara 5 kecamatan di kota ambon. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dominan kawasan pusat kota dengan berbagai aktivitas jasa perdagangan berada pada kecamatan sirimau sehingga pemukiman kepadatan tinggi secara alamiah berkembang mengikuti aktivitas perkotaan tersebut.

Sedangkan untuk konsentrasi penduduk terendah berada pada kecamatan Leitimur Selatan dengan jumlah penduduk 11.862 jiwa atau hanya 3% dari jumlah penduduk kota ambon dan juga memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 235 jiwa/Km2. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dominasi fungsi utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu seluruh desa di kecamatan Leitimur Selatan ini juga merupakan desa adat atau disebut “Negeri” dalam tataran adat masyarakat maluku. Sehingga karakteristik masyarakat tradisional masih kental terlihat di kecamatan ini. Jumlah penduduk Kota Ambon berdasarkan luas wilayah daratan dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2**

**Data Kependudukan Kota Ambon berdasarkan Luas Wilayah Daratan,**

**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Luas Daratan | | Penduduk | | Kepadatan Penduduk |
| Km2 | (%) | Jumlah | (%) | Tiap Km2 |
| 1 | Nusaniwe | 88,35 | 25% | 112.510 | 29% | 1.273 |
| 2 | Sirimau | 86,81 | 24% | 178.611 | 41% | 2.057 |
| 3 | Teluk Ambon | 93,68 | 26% | 51.307 | 12% | 548 |
| 4 | T.A. Baguala | 40,11 | 11% | 73.644 | 15% | 1.836 |
| 5 | Leitimur Selatan | 50,50 | 14% | 11.862 | 3% | 235 |

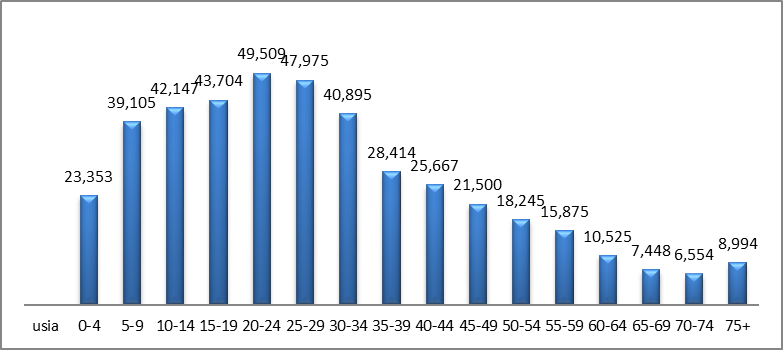
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Ambon dalam angka 2017.

Dilihat dari struktur usia penduduk Kota Ambon tahun 2016 yang berjumlah 427.934 jiwa, lebih didominasi penduduk usia produktif (usia 15 tahun sampai 59 tahun) yaitu berjumlah 290.576 jiwa atau 67,88%, diikuti penduduk usia muda (usia kurang dari 14 tahun) berjumlah 104.206 jiwa atau 24.33% dan penduduk yang berusia lanjut (usia lebih dari 60 tahun) berjumlah 33.152 jiwa atau 7,79%.

Penduduk usia produktif yang sebesar 67,88% berpotensi untuk bekerja dan produktif, dalam menunjang perekonomian keluarga, sekaligus penggerak perekonomian Kota Ambon. Pada usia produktif ini, potensi penduduk terbanyak adalah usia 20-24 tahun sebanyak 49.509 orang dan berusia 25-29 tahun sebanyak 47.975 orang atau seluruhnya sebesar 22,67%, yang umumnya sudah selesai SMA/SMK/MA, telah bekerja atau juga belum bekerja atau sementara melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang tersebar di Kota Ambon.

**Gambar 4.3**

**Struktur Usia Penduduk Kota Ambon Tahun 2016**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon 2016

1. **Visi dan Misi**
2. Visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2017-2022 adalah :

“AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”

Visi diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Harmonis berarti masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga tercapai harmonisasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang saling menghargai sesame orang basudara dengan prinsip-prinsip pela gandong. Nilai-nilai pela gandong yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran. Toleran antar masyarakat dan umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama dan etnik. Oleh karena itu, peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis di Kota Ambon. Kerukunan adalah sikap hidup warga kota yang rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman dan tenteram.
2. Sejahtera berarti menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
3. Religius sebagai salah satu karakter dimana saat ini Indonesia sedang giat membangun pendidikan karakter guna mendidik warga bangsa menjadi manusia yang berkarakter. Yang dimaksud religius dalam visi ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, sehinga terjamin hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya yang berimplikasi pada peningkatan akhlak masyarakat, moral dan etika yang berwawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Misi Walikota dan Wakil Walikota

Misi yang dirumuskan untuk pembangunan Kota Ambon selama 5 tahun kedepan adalah :

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi sosial kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan memiliki kompetensi yang tinggi. Kota Ambon merupakan salah satu entitas keberagaman, salah satu realitas utama yang dialami masyarakat di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Keberagaman bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat yang bersangkutan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat yang beragam tersebut diperlukan upaya penanaman kesadaran sikap toleransi, prinsip kesetaraan dan memandang perbedaan sebagai anugerah Tuhan.

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Misi ini dimaksudkn untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan aparatur pemerintahan serta tersedianya prasarana dan sarana pendukungnya.

1. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ekoomi keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan sumberdaya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan.

1. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai spiritualitas masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-masing serta kearifan budaya lokal; mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup, merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.

**4.1.4 Dinas Perhubungan Kota Ambon**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian Pemerintah Daerah Kota Ambon menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut pada pasal 3 poin d angka 11 yang menjelaskan “Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

**4.1.4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Ambon**

Berdasarkan peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pemebentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu bidang perhubungan.

Adapun Visi dari Dinas Perhubungan Kota Ambon adalah ***"Mewujudkan Pelayanan Perhubungan Yang Handal Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Bagi Kemajuan Daerah Provinsi Maluku Utara Secara Berkelanjutan"***

Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Ambon berdasarakan Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon Bab VIII Pasal 25 Yaitu yaitu sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Dinas

1. Perhubungan mempunyai fungsi :
2. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Perhubungan;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan mum di bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Perhubungan;
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota dibidang Perhubungan.

**4.1.4.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu bidang perhubungan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2008 Nomor 9 seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331) dan Perturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Ambon, dengan susunannya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
5. Sub Bagian Keuangan
6. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari
7. Seksi Lalu Lintas
8. Seksi Angkutan
9. Seksi Keselamatan Teknis Sarana dan Prasarana
10. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
11. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
12. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana
13. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
14. Seksi Kebandarudaraan dan Persandian
15. Seksi Pos dan Telekomunikasi

Disamping struktur diatas, ada 3 (tiga) UPTD yang uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keterminalan
2. Kepala UPTD Keterminalan
3. Sub Bagian Tata Usaha
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran
5. Kepala UPTD Perparkiran
6. Sub Bagian Tata Usaha
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Kepala UPTD PKB
9. Sub Bagian Tata Usaha
10. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urus wajib yang menjai kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Bidang Perhubungan.

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan kegiatan di bidang perhubungan.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perhubungan darat, laut dan udara.
5. Merumuskan rencana strategis Dinas Perhubungan
6. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang Perhubungan, membina dan mengendalikan semua kegiatan Dinas Perhubungan serta wajib menerapkan azas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkup dinas maupun antar unit terkait.
7. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di lingkup Dinas Perhubungan Kota Ambon dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Kota Ambon dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, menetapkan pedoman tata cara pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Membina dan memberikan petunjuk/arahan baik pelaksanaan tugas bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan teknis yang telah di tetapkan secara periodik dan menyusun laporan Akuntabilitas Dinas.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
11. Melaksanakan tugas lain di bidang Perhubungan sesuai kebijakan yang telah di tetapkan oleh Walikota, Wakil Walikota serta Sekretaris Kota.
12. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan yang meliputi urusan umum kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan kegiatan di bidang perhubungan.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perhubungan darat, laut dan udara.
5. Merumuskan rencana strategis
6. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang
7. Bidang Perhubungan Darat
8. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada bidang bulanan, tribulanan dan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lalu lintas, angkutan, keselamatan teknik sarana dan prasarana.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencanan umum jaringan transportasi jalan (RUJTJ) dan rencana umum jaringan transportasi penyeberangan (RUJTP).
11. Mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan, peninjauan lokasi, pengaturan arus lalu lintas dan penerapan lalu lintas sementara.
12. Mengkoordinasikan pengawasan penyelenggaraan Diklat mengemudi, menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan, menyelenggarakan analisa dampak lalu lintas di jalan raya.
13. Mengkoordinasikan penyelenggaraan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pelaporan atas kejadian di jalan yang mengakibatkan korban luka.mati.
14. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan (swiping) di jalan berupa: penyidikan pelanggaran uji, perubahan bentuk kendaraan, pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, penerbitan izin trayek, pengawasan/penertiban pelanggaran tarif angkot/penyeberangan.
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian izin penggunaan sebagian/seluruh jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, menentukan lokasi fasilitas parkir, penetapan lintas penyeberangan dengan cara survey lokasi.
16. Mengkoordinasikan dengan unit/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas bidang.
17. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis yang diminta maupun tidak sebagai bahan pengambilan keputusan.
19. Melaporkan Pelaksanaan tugas bulanan, tribulanan dan tahunan hasil kegiatan bidang perhubungan darat sebagai bahan masukan bagi atasan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
20. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
21. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis yang diminta maupun tidak sebagai bahan pengambilan keputusan
22. Bidang Perhubungan Laut
23. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada bidang bulanan, tribulanan dan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
24. Mengkoordinasikan perencanaan operasional program bidang perghubungan laut
25. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lalulintas dan angkutan laut
26. Mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan keselamatan teknik sarana dan prasarana
27. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan kapal motor, penerbitan pas kecil kapal motor kurang dari atau sama dengan GT 7.
28. Penerbitan sertifakat keselematan/kelaik lautan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal, pengawasan teknik penyelenggaraan prasarana perhubungan laut.
29. Mengkoordinasikan rekomendasi penetapan daerah lingkungan kerja (DLKr) daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan laut Internasional, Nasional, Regional dan Lokal, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal, ijin kegiatan penggerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal, ijin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal, penetapan DUKS di pelabuhan lokal, pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan.
30. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian izin usaha laut, ijin usaha tally, ijin usaha bongkar muat, ijin usaha ekspedisi/freight forwarder, menyiapkan bahan penetapan kebijakan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut serta fasilitas jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan laut, melaksanakan pengawasan operasional kapal pada tempat penyinggahan dalam wilayah Kota.
31. Mengkoordinasikan dengan unit/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas bidang.
32. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan laut untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
33. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis yang diminta maupun tidak sebagai bahan pengambilan keputusan.
34. Melaporkan Pelaksanaan tugas bulanan, tribulanan dan tahunan hasil kegiatan bidang perhubungan laut sebagai bahan masukan bagi atasan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
35. Bidang Perhubungan Udara
36. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada bidang udara bulanan, tribulanan dan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
37. Mengkoordinasikan perencanaan operasional program bidang perghubungan udara.
38. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebandar udaraan dan persandian.
39. Mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi
40. Mengkoordinasikan IMB bagi bangunan yang berada dalam kawasan operasi penerbangan (KKOP), pemberian rekomendasi terhadap pembangunan didalam bandara, pendirian kantor pusat, cabang, agen perusahaan jasa titipan.
41. Mengkoordinasikan penagihan retribusi, karcis anjungan pengantar dan penagihan retribusi pemberangkatan penumpang pesawat udara (RP3U), memberikan ijin lokasi pembangunan tower, penarikan retribusi barang atau cargo.
42. Mengkoordinasikan pemebrian bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat di sekitar bandar udara, melakukan tugas persandian.
43. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan udara untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
44. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis yang diminta maupun tidak sebagai bahan pengambilan keputusan.
45. Melaporkan Pelaksanaan tugas bulanan, tribulanan dan tahunan hasil kegiatan bidang perhubungan udara sebagai bahan masukan bagi atasan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**4.1.4.3 Data Personil**

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Ambon diatas, telah terisi pejabat-pejabat mulai eselon II sampai eselon IV ditambah 3 (tiga) UPTD dengan Jumlah personil dinas dapat diuraikan dalam tabel berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  Tabel. 4.3  Jumlah Personil Dinas Perhubungan Kota Ambon | **URAIAN** | **PNS** | **HONOR/ KONTRAK** | **JUMLAH** | **KET** |
|  | Kepala Dinas  Bagian Tata Usaha :   * Sekretaris * Kasubag * Staf   Bid. Perhubungan Darat :   * Kepala Bidang * Kepala Seksi * Staf   Bid. Perhubungan Laut :   * Kepala Bidang * Kepala Seksi * Staf   Bid. Perhubungan Udara :   * Kepala Bidang * Kepala Seksi * Staf   UPTD Keterminalan   * Kepala UPTD * KTU * Staf * Kontrak   UPTD PKB   * Kepala UPTD * KTU * Staf * Kontrak   UPTD Perparkiran   * Kepala UPTD * KTU * Staf * Kontrak | 1 orang  1 orang  3 orang  10 orang  1 orang  3 orang  10 orang  1 orang  2 orang  3 orang  1 orang  2 orang  1 orang  1 orang  1 orang  8 orang  -  1 orang  1 orang  -  5 orang  -  1 orang  -  - | -  -  -  2 orang  -  -  1 orang  -  -  -  -  -  -  -  -  -  30 orang  -  -  1 orang  -  -  -  11 orang  - | 16 orang  15 orang  6 orang  4 orang  40 orang  8 orang  12 orang |  |
|  | **JUMLAH** | **58**  **orang** | **44 orang** | **102 orang** |  |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon 2017

61

**4.1.4.4 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Ambon**

**4.1.4.4.1 Pelaksanaan Peraturan Perundang-undang**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan magang riset terapan pemerintahan dan penelitian yang penulis lakukan di daerah Kota Ambon. Dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum Kota Ambon berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di Kota Ambon.

Peraturan perundang-undang diatas merupakan aturan yang dijadikan landasan hukum dalam penerapan pelaksanaan retribusi parker di tepi jalan umum Kota Ambon dan juga memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang dilanggar.

**4.1.4.4.2 Kawasan Parkir Kota Ambon**

Kawasan parkir merupakan area atau lahan yang disediakan pemerintah dan kemudiam diresmikan oleh dinas perhubungan kota atau kabupaten terkait yang dijadikan tempat pemberian pelayanan parkir kepada masyarakat atau perorangan/badan yang membutuhkan pelayanan parkir ditepi jalan umum. Berdasarkan data diperoleh dari hasil pelaksanaan magang riset terapan pemerintahan dan penelitian yang penulis lakukan di Kota Ambon. Terdapat kawasan parkir khusus yaitu :

1. Ruas Jalan A.Y Patty
2. Ruas Jalan Sam Ratulangi
3. Ruas Jalan A.M Sangadji
4. Ruas Jalan Diponegoro
5. Ruas Jalan Said Perintah
6. Ruas Jalan Sultan Baabullah
7. Ruas Jalan Yos Sudarso
8. Ruas Jalan Ahmad Yani
9. Ruas Jalan Tulukabessy
10. Ruas Jalan Setia Budi
11. Ruas Jalan Anthoni Rheebok
12. Ruas Jalan Sultan Hairun
13. Ruas Jalan Philip Latumahina
14. Ruas Jalan Yaan Paays
15. Ruas Jalan Imam Bonjol
16. Ruas Jalan Pattimura
17. Ruas Jalan Batu Merah dan sekitarnya

**4.1.4.4.3 Petugas Parkir/Pengawas Parkir**

Petugas parkir / pengawas parkir merupakan pegawi kontrak yang bekerja di dinas perhubungan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait dalam pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan magang riset terapan pemerintahan / penelitian yang penulis lakukan di daerah Kota Ambon pada Dinas Perhubungan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Petugas Parkir / Pengawas Parkir

Dinas Perhubungan Kota Ambon

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pengelola** | | **Lokasi Parkir** | **Jabatan** | | **Keterangan** | |
| 1 | Hendrik | | Jl. Said Perintah | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 2. | Justo | | Jl. Imam Bonjol & A. Gidion | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 3 | Latuheru | | Jl. Pattimura | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 4 | Muh. Abubakar | | Pasar Batu Merah | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 5. | M. Marasabessy | | Jl. Dipenogoro | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 6 | Bahaweres | | Jl. Sam Ratulangi | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 7 | Amir Marasabessy | | Jl. Yos Sudarso | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 8 | Kanikir | | Jl. Sultan Hairun | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 9 | Soamole | | Jl. A.M Sangadji | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 10 | Tuanany | | Jl. Anthony Rhebook | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 11 | Tuasamu | | Jl. A.J. Patty., | Petugas Parkir | | Tenaga Kontrak | |
| 12 | Faris | | Jl. Sultan Baabullah | Petugas Parkir | | | Tenaga Kontrak |
| 13. | Taufan | Jl. Ahmad Yani | | Petugas Parkir | Tenaga Kontrak | | |
| 14. | Gilbert | Jl. Tulukabessy | | Petugas Parkir | Tenaga Kontrak | | |
| 15. | Vallen | Jl. Setiabudi | | Petugas Parkir | Tenaga Kontrak | | |
| 16. | Frans | Jl. Philip Latuhamina | | Petugas Parkir | Tenaga Kontrak | | |
| 17. | Noel | Jl. Yaan Paays | | Petugas Parkir | Tenaga Kontrak | | |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon 2017

Berdasarkan data tabel 4.2 dalam pelaksanaan pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Ambon memliki jumlah personil yang berstatus kontrak.

**4.1.4.4.4 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Ambon**

Tarif retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di daerah Kota Ambon ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kemudian di tahun 2016 Walikota mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir, karena tarif yang di tetapkan walikota dinilai terlalu besar oleh pengguna jasa parkir. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 yang telah diubah dengan peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 atas perubahan tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir, yang ditandatangani dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2018. Untuk tarif di jalan umum tersebut atas pertimbangan asas keadilan kepada masyarakat serta juga di dasarkan pertimbangan membebani pengguna jasa parkir. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.5

Perubahan Harga Tarif Parkir Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Ambon

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kendaraan** | **Tarif Lama**  **Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016** | **Tarif Baru**  **Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018** |
| 1. | Kendaraan roda 2 | Rp.2000 (1 kali parkir) | Rp. 2000 (1 kali parkir) |
| 2. | Kendaraan roda 3 | Rp. 2500 (1 kali perkir) | Rp. 2500 (1 kali parkir) |
| 3. | Kendaraan roda 4 | Rp. 5000 (1 kali parkir) | Rp. 3000 (1 kali parkir) |
| 4. | Kendaraan roda 6 | Rp. 8000 (1 kali parkir) | Rp. 4000 (1 kali parkir) |
| 5. | Kendaraan roda 6 di atas | Rp. 10000 (1 kali parkir) | Rp. 5000 (1 kali parkir) |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon 2018

Berdasarkan penjelasan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum pada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di bandingkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Ambon memiliki selisih nilai yang cukup tinggi disetiap kategorinya.

**4.1.4.4.5 Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Ambon**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan magang riset terapan pemerintahan / penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.6

Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Presentase (%)**  **Terhadap Penerimaan Realisasi Retribusi** |
| 1. | 2014 | | Rp. 905.990.000,- | Rp. 648.381.000,- | 52,54 |
| 2. | 2015 | | Rp. 905.990.000,- | Rp. 748.381.000,- | 116,32 |
| 3. | 2016 | | Rp. 1.134.338.000,- | Rp. 613.238.000,- | 49,86 |
| 4. | | 2017 | Rp. 1.221.665.000,- | Rp. 785.687.000,- | 55.55 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Ambon 2017

Berdasarkan data dari tabel 4.9 dapat dinyatakan bahwa penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Ambon dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peingkatan jumlah penerimaan setiap tahunnya tapi masih mengalami penurunan presentase yang disebabkan beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan. Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Sehingga hal tersebut mendorong pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk terus berinovasi dan melakukan peningkatan terhadap pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan penerimaan hasil dari retribusi ini.

**4.1.4.4.6 Kerjasama yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil magang riset terapan pemerintahan dan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kota Ambon, informasi yakni dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan retribusi.

Parkir di tepi jalan umum, Dinas Perhubungan Kota Ambon melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian Kota Ambon, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Keuangan Kota Ambon. Yang mana pihak Kepolisian Kota Ambon dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon melakukan kerjasama dalam menegakan keamanan dan ketertiban pengaturuan lalulintas Kota Ambon dan keamanan wilayah parkir di Kota Ambon. Sedangkan Badan Keuangan Kota Ambon melakukan kerjasama dalam penetapan target tahunan pencapaian retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.

**4.2 Analisis**

**4.2.1 Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Efektivitas Retribusi Parkir**

Dalam rangka memajukan dan mensejahterahkan masyarakat serta dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang disebutkan dalam pasal 18 a ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah”, kemudian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka (2) menyebutkan “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri dengan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinseip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut mencakup pengaturan tatakeloala pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kelancaran pelaksanaannya makan hal utam yang harus diatur adalah masalah keuangan pada suatu pemerintahan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas selanjutnya juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada angka (64) menjelaskan “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dalam Bab VI poin a menjelaskan bahwa :

* 1. Retribusi jasa umum yaitu merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daeerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Jenis dari Retribusi adalah :

* + 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
    2. Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan
    3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
    4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
    5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
    6. Retribusi Pelayanan Pasar
    7. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pemerintahan Daerah Kota Ambon memliki kewenangan dalam mengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa “retribusi parkir dipungut dalam wilayah kota tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa “subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan tepi jalan umum untuk parkir kendaraan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Bapak R. Sapulette, ST, MT pada hari senin 8 januari 2018 mengatakan bahwa:

Retribusi perkir ditepi jalan umum merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kota Ambon yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kemudian dalam pelaksanaanya pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon melalui UPTD Perparkiran mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan sampai dengan retribusi parker di tepi jalan umum. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Ambon memliki kewenangan penuh dalam pengelolaanya.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilapanyang yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kota Ambon yakni dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan yakni:

1. Ketentuan umum terkait retribusi parker di tepi jalan umum
2. Nama, objek, dan subjek retribusi parker di tepi jalan umum
3. Golongan retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
5. Prinsip dan sasaran penetapan tarif
6. Tarif retribusi
7. Wilayah pungutan retribusi
8. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran penundaan pembayaran
9. Tata cara pemungutan dan pembayaran
10. Sanksi administratif
11. Insentif pemungutan retribusi
12. Ketentuan penyidikan retribusi
13. Ketentuan pidana

Sehingga retribusi parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu kewenangan dan urusan wajib yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kota Ambon yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**4.2.2 Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”. Dan dalam pasa 5 ayat (2) menyebutkan pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan PAD bersumber dari;

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Kemudian hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada pasal 14 poin (1) yang menjelaskan bahwa “pembayaran retribusi di lakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh walikota”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu komponen /potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon yang disebabkan oleh penerimaan dari retribusi ini akan di masukan ke dalam kas daerah Kota Ambon.

Kemudian di Tahun 2017 adanya suatu perubahan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Kota Ambon, yang di tetapkan 1 januari 2017, dan pada tahun 2018 terjadi perubahan tarif retribusi parkir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 yang di tetapkan tanggal 2 januari 2018. Sebelumnya pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah ditetapkan, kemudian dilakukan perubahan yang kedua dan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Kota Ambon.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Bapak R. Sapulette, ST, MT pada hari senin 8 januari 2018 mengatakan bahwa :

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon yakni berkaitan dalam potensi yang dimilik daerah, retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang digolongkan kedalam salah satu pendapatan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas perhubungan Kota Ambon. Selanjutnya Dinas perhubungan Kota Ambon telah melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam meningkatkan penerimaan dari potensi parkir di tepi jalan umum, yang mana mulai dari pengelolaan (perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengawasan) namun hal tersebut masih memberikan hasil yang belum maksimal terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum hal tersebut dapat dilihat dari hasil realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Penerimaan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Ambon yang mana dalam pengelolaanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon. Di setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah, namun dalam pencapaian persentase di setiap tahunnya berdasarkan target yang ditetapkan masih belum mencapai target akan tetapi kalua dilihat pada jumlah PAD yang diterima dari retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami peningkatan. Semua inivasi dan upaya telah kami lakukan (Dinas Perhubungan Kota Ambon), namun yang menjadi permasalahnya adalah target pencapaian setiap tahunnya oleh Badan Keuangan Daerah Kota Ambon dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon terlalu tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan magang riset terapan pemerintahan dan penelitian yang dilakukan penulis bahwa segala upaya dan inovasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk melakukan peningkatan jumlah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di setiap tahunnya, hal tersebut di mulai dari;

1. Penambahan jumlah personil dan petugas parkir

Dalam upaya memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat terhadap pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Ambon mererkut petugas parkir dari putra daerah Kota Ambon yang ditugaskan dengan perjanjian kontrak kemudian ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.

1. Melakukan mitra dan kerjasama dengan instasi lain

Dalam upaya memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat terhadap pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dinas Perhubungan Kota Ambon melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, satuan polisi pamong praja, dan masyarakat sekitar kawasan parkir guna untuk peningkatan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

1. Membuat peraturan perundang-undangan

Terkait untuk mengsahnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon di mata hokum, maka Dinas Perhubungan Kota Ambon membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Ambon, hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut bersifat sah dan tidak dapat dituntut ke dalam pengadilan/hukum.

1. Melengkapi sarana dan prasarana

Dalam mendukung dan memberikan peningkatan pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan Kota Ambon terus melengkapi sarana dan prasarana pendukung. Agar pelaksanaan pemberian pelayanan dapat terlaksana dengan tertib dan nyaman.

1. Perubahan tarif retribusi

Dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon, maka dilakukanlah perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun hal ini ditanggapi oleh sebagian masyarakat ada yang menerima dan ada yang tidak mau menerima sehingga ada sebagian masyarakat tidak mau membayar biaya pelayanan tersebut dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap kas daerah Kota Ambon.

Namun hal tersebut juga belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam realisasi penerimaan belum mencapai target disetiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi penerimaan di tahun 2016 dan 2017 pada tabel 4.4 sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara kedua dengan kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon hari rabu 10 januari 2018 menerangkan bahwa :

Hal yang menjadi penyebab penerimaan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum di setiap tahunnya tidak mencapai target disebabkan karena penetapan target retibusi parkir di tepi jalan umum terlalu tinggi. Dalam penetapan target retribusi ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Ambon yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena kepala daerah menginginkan adanya peningkatan pendapatan jumlah penerimaan retribusi di setiap tahunnya, yang mana juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari hasil pengamatan magang riset terapan pemerintahan dan penelitian yang penulis lakukan diketahui kendala yang menghambat dalam pencapaian target retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon adalah :

1. Masih banyak terdapat pelaksanaan pemungutan parkir liar di lapangan
2. Perekrutan petugas parkir dari tenaga honorer yang memiliki tanggung jawab dan kedisiplinan yang kurang. Sehingga memungkinkan terjadinya penyeludupan dan penggelapan uang parkir untuk menutupi kebutuhan pribadi si petugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas parkir Bapak Taufan pada hari kamis 11 januari 2018 mengatakan bahwa :

Tingkat kesejahteraan para petugas parkir terkait perolehan gaji tiap bulannya belum mampu mencukupi kebutuhan mereka di seitap minggunya.

Sehinggal hal tersebut biasa dijadikan salah satu faktor yang ikut menghambat peningkatan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum.

**4.3 Analisis Fokus Magang dari Perspektif Teoritis**

**4.3.1 Efektivitas Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Halim, dkk (2009:72) menyatakan bahwa;

“Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuantitas maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain.”

Bayangkara (2008:14) “efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahan untuk mencapai tujuannya”. Dari pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Bapak R. Sapulette, ST, MT pada hari senin 8 januari 2018 menjelaskan bahwa :

Dalam perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon yaitu membentuk visi dan misi dalam penerapan pemberian pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum kemudian merancang segala faktor-faktor pendudung dalam pelaksanaan dan menggaris bawahi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Kemudian berdasarkan dari hasil pengamatan penulis di lapangan dalam perencanaan terhadap efektivitas retribusi parkir di tepi jalan umum terlaksana belum efektif. Hal tersebut masih dapat dilihat dengan masih banyaknya gambaran dan rumuskan kegiatan-kegiatan tertentu belum jelas. Keudian pembagian tugas dari para petugas parkir yang dilapangan dan pengawasan personil belum terlaksana dengan maksimal.

1. Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Banyak pandangan umum yang mengartikan bahwa retribusi sama dengan pajak, akan tetapi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak sifatnya memaksa dan wajib**,** sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung sesuai undang-undang. Disamping itu menurut Mardiasmo (2006:12);

“mengatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelengarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sedangkan retribusi sifatnya tidak wajib”.

1. Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 64, mengatakan bahwa “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dalam pokok-pokok pengaturan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan adalah :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam menyediakan layanan dan penyelengaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah.

Disamping itu dalam pokok-pokok pengaturan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) jenis retribusi daerah yaitu 1). retribusi tera/tera ulang, yang, 2). retribusi pengendalian menara telkomunikasi, 3). retribusi pelayanan pendidikan, 4). retribusi izin usaha. keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu 1*). Retribusi Jasa Umum*, 2). *Retribusi Jasa Usaha,* dan 3). *Retribusi Perizinan Tertentu*.

Marihot P. Siagian (2005:6), mengatakan bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi”, hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Ambon diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tujuan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah

1. Parkir

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988). Jadi, parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

**4.3.2 Hambatan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir**

Menurut Djaenuri (2012:88) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian dijelaskan juga oleh Yani (2009:51) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undang yang berlaku”.

Dari pernyataan di tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di pungut sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang diipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kelola dan diurus sendiri oleh pemerintahan daerah, sehingga hal tersebut membuat pemerintahan daerah Kota Ambon harus memiliki kemampuan yang optimal dalam mengelola semua sumber PAD, sehingga PAD Kota Ambon meningkat dan efektif.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Kaho (2010:170) menjelaskan bahwa “Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”.

Sedangkan menurut Siahan {2005:5) tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pengertian retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa negara.

Berdasarkan penjelasan teori di atas maka dalam upaya meningkatkan peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon. Dinas Perhubungan Kota Ambon selalu melakukan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada dasarnya pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan ada meningkatnya PAD maka kemampuan keuangan daerah semakin baik yang mana berpengaruh juga terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

**4.3.3 Upaya Dalam Menigkatkan Retribusi Parkir**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon pada hari selasa tanggal 9 januari 2018 yang bertempat diruangan kepala Dinas Perubungan Kota Ambon Bapak R. Sapulette, ST, MT, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon dengan bersumber pada salah satu retribusi daerah yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon telah berupaya dan membuat segala inovasi, pembaharuan, peningkatan dan penambahaan kawasan parkir serta perbaikan retribusi ini. Hal tersebut telah memberikan hasil terhadap peningkatan penerimaan disetiap tahunnya terus meningkat namun hasil penerimaan realisasi yang diterima belum mencapai target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah. Hal ini disebebkan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan penghitungan target tersebit ditetapkan tidak berdasarkan hasil kerja sama antara kedua pihak, yakni Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan Badan Keuangan Daerah Kota Ambon. Sehingga dengan kata lain hanya menguntungkan kepentingan sendiri antara dua pihak tersebut.

Kemudian berdasarkan dari hasil pengamatan penulis dilapangan dalam efektivitas retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ambon masih terdapat beberapa hambatan yang akhirnya mengganggu proses kelancaran dan juga akan memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Ambon. Hambatan tersebut seperti :

1. Tingginya target pencapaian retribusi parkir di tepi jalan umum

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan upaya pencapaian penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena target realisasi retribusi tersebut parkir ditepi jalan umum terlalu tinggi dan Dinas Perhubungan Kota ambon mendapatkan kesulitan dalam mencapai target tersebut.

1. Kurangnya pengawasan terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum

Kurangnya pengawasan yang optimal oleh petugas dan pengawas parkir terhadap pelaksanaan kegiatan parkir dilapangan. Sehingga menyebabkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun juru parkir yang melakukan penyelundupan uang parkir.

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Pemberian pelayanan parkir masih kurang maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana yang membantu proses pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sehingga masyarakat merasa enggan dan malas melakukan pemarkiran kendaraan dan akhirnya juga akan berdampak terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

1. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembayaran retribusi

Hal ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat Kota Ambon masih banyak rata-rata yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA sedangkan untuk tingkat diploma dan sarjana masih sedikit. Sehingga hal tersebut memperngaruhi pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Proses analisis sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya sehubungan dengan efektifitas Retribusi Perkir di Tepi Jalan Umum yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Untuk mengetahui pernyataan singkat dari penelitian ini, maka pada penulis bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Eefektifitas retribusi parkir ditepi jalan umum yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan serta ketetapan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun dalam pelaksanaanya masih membutuhkan peningkatan dan pembaharuan terkait dengan pengaruh permasalahan yang menghambat dari retribusi parkir di tepi jalan umum.
2. Hambatan dalam retribusi parkir ditepi jalan umum yakni pemberian pelayanan dan kontribusi terhadap PAD Kota Ambon disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;
3. kelengkapan sarana dan prasaran pemberian pelayanan parkir kepada wajib retribusi parkir ditepi jalan umum masih sangat terbatas.
4. Kemudian sikap dari petugas dilapangan menjadi cerminan keseriusan Dinas Perhubungan Kota Ambon dalam penarikan retribusi parkir ditepi jalan umum.

85

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon dalam peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas retribusi parkir di tepi jalan umum, adapun upaya yaitu; merubah dan memperbaharui harga tarif pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang di tetapkan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Ambon.

**5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang disimpulkan dalam sub bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan saran guna terlaksananya pengelolaan parkir ditepi jalan umum yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

1. Efektifitas retribusi parkir ditepi jalan umum yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon harus terus membuat inovasi dan pembenahan dalam pengelolaan terkait dengan banyaknya permasalahan baik dari masyarakat maupun dari petugas sendiri supaya akan memberikan dampak yang lebih baik kedepannya, sehingga PAD Kota Ambon lebih efektif.
2. Terkait dengan mengatasi hambatan dalam retribusi parkir ditepi jalan umum, adapun hal yang harus diperbaiki ialah;
3. Melengkapi sarana prasarana yang membantu dalam pengoptimalkan pemberian pelayanan parkir diteppi jalan umum kepada masyarakat wajib retribusi.
4. Membuat aturan dan sanksi yang tegas guna untuk membentuk tugasnya sebagai juru parkir. Serta mengoptomalkan koordinasi dengan instasi lainnya di Kota Ambon guna unytuk klancaran dalam pelaksanaan pengelonaan retribusi parkir ditepi jalan umum.
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat umu terkait tentang retribusi parkir merupakan suatu bentuk pelayanan yang disediakan untuk masyarakat dan memberikan pengaruh terhadap PAD Kota Ambon.
6. Merevisi kembali jumlah perubahan tariff yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Kota Ambon, karena harga tariff yang ditetapkan kurang tepat terhadap perbandingan dari penggunaan lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Ambon.